

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Kasinius, Jakarta, 2009.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Eerte DeelVierde druk. P.Noordhoff, Groningen, 1921.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- I Gede Pitana, *Desa Adat dalam Arus Modernisasi dalam Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, BP.Denpasar, Denpasar, 1994.
- I Ketut Sandika, *Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu*, Paramita, Surabaya, 2011.

- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. FIKAHATI ANESKA, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, "Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)", dalam I Made Widnyana, dkk; Editor, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, Eresco Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993.
- I Wayan Surpha, *Eksistensi Desa Adat di Bali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (tentang pemerintahan Desa)*, Cetakan I, Upada Sastra, Denpasar, 1992.
- J.E. Sahetapy, *Politik Kriminal dalam Perspektif Kejahatan Kekerasan Sebuah Potret Diri*, PT. Rajawali, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982.
- Joshua Dressler, *Understanding Criminal Law*, Second Edition, Printed in the United States of America, 1995.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2010.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985.
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, 1983.
- Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia; Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana cetakan ke-2*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1998.

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Roeslan Saleh, *Stesel Pidana Indonesia Cetakan III*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Gunung Mulia, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, FH-Undip, Semarang, 2009.
- Sudikno Metrokusuma, *Norma dan Kaidah Hukum*, Offset Gadjah Mada University Press, 1986.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asaa Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1988.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Penerbit Bayu Publishing, Malang, 2008.

Tjok Istri Putra Astiti, *Awig-awig Ditinjau dari Sudut Perundang-Undangan Republik Indonesia, dalam Awig-Awig Desa Pakraman Dulu, Kini, dan Masa Depan*, Bali Shanti, Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Kebudayaan Bali, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas Udayana, Denpasar, 2009.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Persepektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.

Wayan P.Windia, *Bali Mawacara: Gagasan Satu Hukum Adat (Awig-awig) dan Pemerintahan di Bali*, (Denpasar: Pusat Penelitian Hukum Universitas Udayana, 2008).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia cetakan ke-3*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974.

## **B. Peraturan Perundangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Penyelenggaraan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat.

### C. Sumber Lain

<https://brahmacarya.wordpress.com/2011/06/10/pratima-omkara-1/>

<https://www.facebook.com/balipost/posts/414245535308760>

### D. Disertasi, Bahan Kuliah.

Marsudin Nainggolan, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, 2009.

I Gede Yusa, *Eksistensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011.

I Gusti Ketut Ariawan, *Pemenuhan Kewajiban Adat Dalam Implementasi Rancangan KUHP (Kajian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Hukum Adat Pidana Bali)*, Disertasi, Program Studi Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya : Universitas Airlangga 1999.

I Ketut Wirawan, *Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Penyelenggara Desa Pakraman dalam Sistem Pemerintahan Desa di Bali)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2012.

TIP Astiti, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan Hukum Adat di Bali*, Laporan Penelitian, Denpasar, 1982.